

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas yang dilaksanakan di Indonesia sebab Indonesia memiliki potensi jumlah penduduk yang besar. Menurut BPS (2020), Indonesia 269 juta penduduk dan pada tahun 2030 Indonesia diperkirakan akan mencapai titik puncak bonus demografi. Pembangunan ekonomi awalnya hanya memandang tingginya pertumbuhan ekonomi sebagai keberhasilan pembangunan di suatu negara tanpa memerhatikan aspek lainnya seperti sumber daya manusia, ketimpangan pendapatan, kemiskinan, dan lain-lain. Sumber daya manusia masih dipandang sebagai faktor produksi saja, sama seperti tanah, modal dan teknologi padahal sumber daya manusia memiliki nilai-nilai dan potensi kemanusiaan yang dapat diaktualisasikan untuk mendukung pembangunan sebuah negara (Mongan, 2019). Oleh karena itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator penting untuk melihat sisi lain dari keberhasilan pembangunan ekonomi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Development Program (UNDP) yang menjadi representasi dari perkembangan manusia dalam mengakses pembangunan dalam suatu negara untuk memperoleh akses kesehatan, pendidikan, pendapatan dan sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dan dapat mengklasifikasikan pembangunan suatu wilayah/negara yang diukur melalui tiga dimensi yaitu

Indeks Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, dan Indeks Pendapatan (Seth & Villar, 2017).

Penelitian mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bukan merupakan yang baru yang pertama kali dilakukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dasic et al. (2020) bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dipengaruhi oleh indikator sosial ekonomi dan orientasi kebijakan pembangunan ekonomi yang berlaku di suatu negara baik dalam bentuk kebijakan daerah ataupun kebijakan nasional. Selanjutnya menurut penelitian yang dilakukan oleh Çağlayan-akay & Van (2017) bahwa keberhasilan dalam pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selain direpresentasikan melalui pertumbuhan ekonomi juga melalui kualitas sumber daya manusia dan keterampilannya yang merupakan kriteria utama dalam penilaian keberhasilan pembangunan di suatu negara.

Penelitian lainnya yang juga membahas mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dilakukan oleh Danu & Zuhdi (2013) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, memang membuat kontribusi positif terhadap tujuan publik, hasil tersebut didukung pula oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gupta et. al. (1998) yang menyebutkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan dan pendidikan dapat membawa efek positif pada sumber daya manusia yang, pada akhirnya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain pengeluaran pemerintah, hal penting lainnya yang berperan dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yaitu dengan nilai dari PDRB sebagai representasi dari pertumbuhan ekonomi. PDRB menjadi salah satu yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat dari adanya keberhasilan pembangunan suatu daerah ditinjau dari sisi ekonominya, Pertumbuhan ekonomi yang direpresentasikan oleh PDRB ini merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kemajuan pembangunan dan merupakan

salah satu dampak nyata atas keberhasilan dari beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan pada waktu sebelumnya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ariwuni & Kartika (2018) bahwa PDRB memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Indonesia mempunyai nilai yang kurang memuaskan terkait peringkat IPM di dunia. Berdasarkan klasifikasi UNDP (United Nation Development Program), Indonesia berada pada nilai pembangunan menengah dan menempati peringkat 107 di dunia pada tahun 2018 padahal Indonesia telah tergabung dalam G20 yang artinya Indonesia menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Dengan adanya perekonomian yang besar ini seharusnya dapat menjadi pendorong aspek lainnya yang meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Indonesia saat ini berada di peringkat enam dari sepuluh negara di regional Asia Tenggara hingga data tahun 2018 dan mempunyai nilai indeks sebesar 0,712 di bawah negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Peringkat Indonesia yang berada pada posisi lima negara terendah dalam indeks pembangunan manusia-nya adalah sebuah ironi yang harus dijadikan perhatian khusus oleh pemerintah. Oleh sebab itu, dibutuhkan kontribusi pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan modal manusia yang kompetitif dan mampu menjadi negara dengan kategori IPM dengan level yang lebih baik sekaligus meningkatkan pembangunan ekonomi (Arfiyansyah, 2018).

Tabel 1.1 Perbandingan indikator IPM Indonesia dan Filipina 2015-2018

Negara	Indikator	2015	2016	2017	2018	Negara	Indikator	2015	2016	2017	2018
Filipina	UHH (years)	0.779	0.782	0.784	0.786	Indonesia	UHH (years)	0.781	0.785	0.789	0.792
	HLS (years)	12.8	12.7	12.7	12.7		HLS (years)	12.9	13.3	13.4	13.5

RLS (years)	9.3	9.3	9.4	9.4	RLS (years)	7.9	7.9	8	8.17
PPP (US\$)	8144	8564	9017	9414	PPP (US\$)	9815	10197	10589	11042
IPM	0.701	0.704	0.708	0.711	IPM	0.695	0.703	0.707	0.712

Sumber : UNDP, 2022

Berdasarkan data yang dirilis oleh UNDP dengan pembaruan data mencapai tahun 2020, jika membandingkan antara Indonesia dengan Filipina yang berada di peringkat ke lima dan enam di kawasan Asia Tenggara dan berada di peringkat yang sama dalam peringkat dunia yaitu 107 maka akan ditemukan fakta bahwa Indonesia memiliki RLS Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan Filipina. RLS Filipina pada tahun 2018 sebesar 9.4 tahun sementara Indonesia memiliki RLS sebesar 8.17 tahun (UNDP,2020). Angka RLS Indonesia tersebut mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih belum menyelesaikan masa sekolahnya sesuai dengan harapan wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu 12 tahun. Sehingga ruang permasalahan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia berada pada kualitas sumber daya manusia yang masih berada dibawah negara lainnya di Asia Tenggara. Rendahnya kualitas sumber daya manusia secara multiplier akan berdampak pada keberhasilan pembangunan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebab selain pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia dan keterampilannya merupakan bagian dari membantuk IPM yang menjadi kriteria utama dalam penilaian keberhasilan pembangunan di suatu negara (Çağlayan-akay & Van, 2017).

Tabel 1.2 Komponen IPM dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 2015-2018

Tahun	UUh (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	IPM
2015	70.78	12.55	7.84	10150	69.55
2016	70.9	12.72	7.95	10420	70.18

2017	71.06	12.85	8.1	10664	70.81
2018	71.2	12.91	8.17	11059	71.39

Sumber data : BPS, 2022

Pada tabel 1.2 diatas, menunjukkan komponen pendidikan yang dapat diukur melalui indeks pendidikannya yang terdiri atas Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Berdasarkan tabel diatas HLS Indonesia menunjukkan peningkatan yang relatif kecil. Sampai dengan tahun 2018 HLS Indonesia berada pada 12.91 tahun, atau kurang lebih mencapai jenjang Diploma 1 dalam strata pendidikan yang berlaku di Indonesia yang berarti setiap anak yang masuk sekolah dasar dalam usia minimal 7 tahun sesuai aturan berlaku diharapkan dapat menempuh pendidikan hingga Diploma 1 atau selama 12.91 tahun.

Dalam kurun waktu 2015 sampai 2018 RLS di Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 tercatat RLS Indonesia mencapai 8.17 tahun atau dalam jenjang pendidikan yang berlaku di Indonesia hanya sampai kelas VIII SMP. Permasalahan RLS dan HLS yang rendah ini disebabkan oleh aksesibilitas untuk menempuh pendidikan yang belum merata yang diakibatkan oleh realisasi anggaran pendidikan yang hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur namun kurang memerhatikan kualitas pendidikan yang dihasilkan, hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muliza et al., 2017). Padahal, dalam hal meningkatkan kualitas sumber daya manusia, berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan ditemukan hasil bahwa pendidikan berkualitas yang dapat ditempuh oleh seluruh masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Menurut Gupta et. al. (1998) dalam Danu & Zuhdi (2013) Pengeluaran pemerintah, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, memang membuat kontribusi positif terhadap tujuan publik. Tujuan publik yang dimaksud adalah peningkatan kesejahteraan taraf hidup masyarakat (Danu & Zuhdi, 2013).

Kemudian, seiring dengan perkembangan otonomisasi daerah, setiap daerah mampu memperoleh pendapatan sendiri dan mengalokasikannya untuk membiayai prioritas pembangunan daerahnya. Dalam hal meningkatkan mutu pendidikan didaerahnya, pengeluaran pemerintah daerah memiliki peran peningkatan IPM yang dibiayai melalui APBD dalam anggaran pada fungsi pendidikan. Pengeluaran pemerintah daerah sudah dialokasikan dalam APBD sebagai belanja daerah untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kemampuan pendapatannya. Sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta melakukan pembangunan yang berfokus pada peningkatan pembangunan manusia (Hidayati & Woyanti, 2021).

Menurut Mankiw (2006), perbaikan kualitas sumber daya manusia sebagai modal dalam pembangunan ekonomi yang mendasar pada suatu wilayah dapat terjadi dengan melakukan perbaikan pada kualitas pendidikan dan kesehatan yang diharapkan dapat memperluas kesempatan untuk mencapai taraf hidup layak (Anantika & Sasana, 2020). Perbaikan kualitas pendidikan tersebut tentunya salah satunya memerlukan aspek pendanaan yang cukup memadai untuk mengembangkan pembangunan manusia di setiap wilayah.

Tabel 1.3 Akumulasi Pengeluaran Pemda se-Indonesia Sektor Pendidikan Tahun 2014-2018

TAHUN	PENGELUARAN PEMERINTAH	IPM
SEKTOR PENDIDIKAN		
2015	25,984,976,123,350	69.55
2016	160,583,294,339,606	70.18
2017	295,688,682,471,279	70.81
2018	311,270,439,256,030	71.39

Sumber data : DJPK, 2021 (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan)

Berdasarkan tabel 1.3 diatas, setiap tahunnya pemerintah selalu meningkatkan jumlah anggaran yang dibelanjakan pada sektor pendidikan. Namun, peningkatan jumlah anggaran yang cukup signifikan tersebut, nyatanya

belum dibersamai oleh peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang signifikan pula, hal ini disebabkan realisasi anggaran pendidikan kurang memerhatikan kualitas pendidikan yang dihasilkan (Muliza et al., 2017). Hal ini mengindikasikan bahwa anggaran pendidikan yang telah dikeluarkan belum sepenuhnya difungsikan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas dan fasilitas dari pendidikan di tiap-tiap daerah melalui penerimaan manfaat pendidikan gratis yang berkualitas bagi masyarakat, selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Fithri & Kaluge (2017) sehingga walaupun anggaran pendidikan secara nominal terus mengalami peningkatan jumlah yang signifikan, namun hasilnya terhadap kontribusi perbaikan kualitas pembangunan sumber daya manusianya masih belum sesuai harapan.

Padahal, Menurut Sukirno (2005) dalam Anantika & Sasana (2020) Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membeli sejumlah barang/jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang mendorong pengembangan sumber daya manusia melalui perbaikan dari segi kualitas sumber daya manusia melalui aspek pendidikan Pengeluaran pemerintah dapat digunakan juga sebagai cerminan dari kebijakan yang diambil pemerintah dalam satu wilayah. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting yang menunjang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya dijadikan sebagai prioritas pemerintah dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan hal yang wajib dalam mencapai kehidupan yang layak (Mahendra, 2020).

Tabel 1.4 Tabel IPM dan PDRB Tahun 2015-2018

Provinsi	IPM				PDRB (juta Rupiah)			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
ACEH	69.45	70	70.6	71.19	112665532.3	116374299.9	121240978.7	126824365.2
SUMATERA UTARA	69.51	70	70.57	71.18	440955852.5	463775464.9	487531231.9	512762626.9
SUMATERA BARAT	69.98	70.73	71.24	71.73	140719474.2	148134243.9	155984364.1	163996189

RIAU	70.8 4	71.2	71.7 9	72.4 4	448991963. 5	458769340. 1	470983511. 6	482064629
JAMBI	68.8 9	69.6 2	69.9 9	70.6 5	125037398	130501132. 1	136501706. 1	142901995.8
SUMATERA SELATAN	67.4 6	68.2 4	68.8 6	69.3 9	254044875. 6	266857400. 8	281571013. 1	298484068.4
BENGKULU	68.5 9	69.3 3	69.9 5	70.6 4	38066005.7 2	40076543.8 3	42073515.5 9	44164109.81
LAMPUNG	66.9 5	67.6 5	68.2 5	69.0 2	199536916. 6	209793728. 3	220626096. 8	232165987
KEP. BANGKA BELITUNG	69.0 5	69.5 5	69.9 9	70.6 7	45962303.9 9	47848371.7 9	49985153.6 7	52208035.5
KEP. RIAU	73.7 5	73.9 9	74.4 5	74.8 4	155131351	162853039	166081675. 7	173498751.4
DKI JAKARTA	78.9 9	79.6	80.0 6	80.4 7	1454563847	1539916881	1635359147	1735208291
JAWA BARAT	69.5	70.0 5	70.6 9	71.3	1207232342	1275619241	1343662142	1419624140
JAWA TENGAH	69.4 9	69.9 8	70.5 2	71.1 2	806765092. 2	849099354. 7	893750296. 2	941091143.9
DI YOGYAKARTA	77.5 9	78.3 8	78.8 9	79.5 3	83474451.5 5	87685809.6 1	92300243.8 9	98024014.33
JAWA TIMUR	68.9 5	69.7 4	70.2 7	70.7 7	1331376099	1405563511	1482299577	1563441825
BANTEN	70.2 7	70.9 6	71.4 2	71.9 5	368377203	387835089. 5	410136998. 4	433782714.2
BALI	73.2 7	73.6 5	74.3	74.7 7	129126562. 2	137296445. 2	144933312	154072662.6
NUSA TENGGARA BARAT	65.1 9	65.8 1	66.5 8	67.3	89337985.8	94524289.8 5	94608209.3 5	90349129.08
NUSA TENGGARA TIMUR	62.6 7	63.1 3	63.7 3	64.3 9	56770793.2 6	59678012.4 1	62725410.4 7	65929193.54
KALIMANTAN BARAT	65.5 9	65.8 8	66.2 6	66.9 8	112346755. 2	118183272. 6	124289172. 2	130596320.5
KALIMANTAN TENGAH	68.5 3	69.1 3	69.7 9	70.4 2	78890968.3 5	83900239.3 7	89544898.3	94566247.89
KALIMANTAN SELATAN	68.3 8	69.0 5	69.6 5	70.1 7	110863116. 5	115743572. 8	121858523. 4	128052578
KALIMANTAN TIMUR	74.1 7	74.5 9	75.1 2	75.8 3	440676356. 2	439003832. 4	452741908. 2	464694426.7
KALIMANTAN UTARA	68.7 6	69.2	69.8 4	70.5 6	49315745.0 5	51064737.3 5	54537307.2 4	57459308.92
SULAWESI UTARA	70.3 9	71.0 5	71.6 6	72.2	70425330.2 2	74764660.4 8	79484025.0 2	84249720.17
SULAWESI TENGAH	66.7 6	67.4 7	68.1 1	68.8 8	82787201.8 2	91014564.8 8	97474859.1	117555833.6
SULAWESI SELATAN	69.1 5	69.7 6	70.3 4	70.9	250802993. 1	269401313. 5	288814171. 1	309156193.2
SULAWESI TENGGARA	68.7 5	69.3 1	69.8 6	70.6 1	72993327.9 4	77745512.4 2	83001687.0 1	88310047.92
GORONTALO	65.8 6	66.2 9	67.0 1	67.7 1	22068802.6 1	23507209.0 1	25090130.6 4	26719272.12

SULAWESI BARAT	62.9 6	63.6	64.3	65.1	25964432.1 4	27524767.0 6	29282487.0 6	31114142.71
MALUKU	67.0 5	67.6	68.1 9	68.8 7	24859196.5 7	26284228.0 2	27814053.2 2	29457133.27
MALUKU UTARA	65.9 1	66.6 3	67.2	67.7 6	20380303.9 2	21556679.7 9	23210864.6 5	25034082.2
PAPUA BARAT	61.7 3	62.2 1	62.9 9	63.7 4	52346485.9 4	54711282.1 8	56907958.5 4	60465521.38
PAPUA	57.2 5	58.0 5	59.0 9	60.0 6	130311604. 9	142224930. 7	148818289. 9	159711852.6
INDONESIA	69.5 5	70.1 8	70.8 1	71.3 9	9033168670	9498833001	9995224919	1053773655 2

Sumber data : BPS, 2022 (Badan Pusat Statistik, 2022)

Selain pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, Pertumbuhan ekonomi yang di representasikan oleh PDRB atas dasar harga konstan juga memiliki hubungan keterkaitan dengan pembangunan manusia. Menurut Putra dan Ulupui (2015:864) dalam A. O. F. Diba et al. (2018) menyatakan bahwa meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia tidak hanya bertumpuan pada peningkatan ekonomi saja melainkan perlu adanya pembangunan dalam segala aspek. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia yang disertai dengan pembangunan yang merata. Pemerataan pembangunan akan menyebabkan semua penduduk merasakan hasil dari pembangunan tersebut yang ditandai dengan tidak adanya ketimpangan dalam pembangunannya dan menekan masalah kemiskinan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

PDRB merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat pemerataan pembangunan yang sudah terjadi. Pembangunan yang merata akan meningkat pendapatan baik itu barang dan jasa yang di produksi. Hal ini dikarenakan PDRB merupakan suatu indikator yang menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan atau balas jasa faktor produksi disuatu daerah.

Berdasarkan tabel diatas, dari 34 provinsi di Indonesia hingga tahun 2018 memiliki nilai IPM yang berbeda – beda. Tiga provinsi dengan IPM terbesar diduduki oleh DKI Jakarta, DIY dan Kalimantan Timur. Sedangkan, tiga provinsi dengan IPM terkecil diduduki oleh Papua, Papua Barat dan Nusa

Tenggara Timur. Pada sisi lain tiga provinsi dengan PDRB terbesar diduduki oleh DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Sedangkan, empat provinsi dengan PDRB terkecil diduduki oleh Maluku Utara, Gorontalo, Maluku dan Sulawesi Barat. Nilai IPM yang berbeda-beda ini salah satunya disebabkan oleh adanya perbedaan pada setiap nilai PDRB Provinsi. PDRB yang diperoleh setiap provinsi ini akan membuat perbedaan hasil pembangunannya. Provinsi dengan PDRB yang relatif lebih rendah akan membuat provinsi tersebut tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah lainnya A. O. F. Diba et al. (2018). Berdasarkan data pada tabel diatas juga ditemukan indikasi bahwa PDRB yang diakumulasikan secara nasional memiliki presentase peningkatan nilai yang lebih besar daripada presentase peningkatan indeks pembangunan manusia yakni $\pm 0.05\%$ s.d 1% untuk peningkatan PDRB disetiap tahunnya dan $\pm 0.009\%$ untuk peningkatan IPM. Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh A. Fahmi & Dalimunthe (2018) dan Mahendra (2020). IPM yang rendah akan berdampak pada rendahnya produktivitas kerja penduduk (Danu & Zuhdi, 2013).

Peningkatan PDRB yang tinggi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan salah satu dimensi pembangunan manusia (A. Fahmi & Dalimunthe, 2018). PDRB menjadi indikator yang memperlihatkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan melalui balas jasa faktor produksi disuatu daerah. Menurut Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern yang dikemukakan oleh Profesor Kuznet meningkatnya PDRB akan meningkatkan pertumbuhan output perkapita serta mengubah pola konsumsi masyarakat dan daya beli masyarakat sehingga terjadi peningkatan indeks pembangunan manusia. Daya beli masyarakat yang dipengaruhi oleh PDRB ini merupakan salah satu indeks komposit yang ada dalam indeks hidup layak dalam IPM, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ariwuni & Kartika (2018), Caesaktiti et al. (2021), A. O. F. Diba et al. (2018), Muliza et al. (2017). Namun, hal berbeda diungkapkan oleh Handayani & Woyanti (2021)

bahwa PDRB tidak mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara langsung yang disebabkan distribusi pendapatan masyarakat masih kurang merata.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas yang berkaitan dengan realisasi pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan secara efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar indikator HLS dan RLS di Indonesia bisa meningkat sesuai harapan dan tidak meratanya perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di setiap provinsi yang disebabkan adanya perbedaan nilai PDRB yang dihasilkan oleh tiap-tiap provinsi serta adanya perbedaan penelitian mengenai pengaruh PDRB terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi penyebab pentingnya riset ini dilakukan lebih lanjut. Penelitian mengenai topik ini penting untuk dilakukan agar diketahui seberapa jauh pengaruh dari pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan yang telah dialokasikan dan pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia tahun 2015-2018.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa pertanyaan permasalahan yang akan diangkat yaitu :

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2015-2018?
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2015-2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai diantaranya :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2015-2018
2. Untuk mengetahui pengaruh PDRB dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2015-2018

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah di uraikan, maka diharapkan bahwa penelitian ini dapat bermanfaat untuk beberapa pihak, diantaranya :

1. Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan mampu menginformasikan efektivitas pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan serta pengaruh secara langsung dari PDRB terhadap peningkatan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia agar mampu bersaing secara global.

2. Praktis

- a) Bagi peneliti dapat menjadi sarana pengaplikasian ilmu yang telah di dapati selama menempuh pendidikan jenjang sarjana pendidikan ekonomi dan menambah wawasan peneliti tentang hal-hal yang ada dibalik peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mendukung peningkatan efektivitas kegiatan ekonomi melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia
- b) Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengatur alokasi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan membuat strategi peningkatan nilai PDRB agar efektif dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini diperlukan batasan-batasan penelitian yang jelas agar peneliti dapat lebih fokus dalam meneliti. Adapun ruang lingkup sebagai batasan dalam penelitian ini adalah :

1. Indeks Pembangunan Manusia pada 26 Provinsi di Indonesia tahun 2015-2018
2. Pengeluaran pemerintah daerah hanya pada fungsi pendidikan pada 26 Provinsi di Indonesia tahun 2015-2018
3. PDRB yang dapat dilihat pada 26 Provinsi di Indonesia tahun 2015-2018

